

**KETIDAKPATUHAN TIONGKOK TERHADAP
NON-PROLIFERATION TREATY (NPT) PADA TAHUN
2019-2023**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*

Oleh:

AS SYIFA ZAHIRA YENASTI

2110851007



Dosen Pembimbing:

Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si

Silvi Cory, S.Pd, M.Si

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab ketidakpatuhan Tiongkok terhadap *Non-Proliferation Treaty* tahun 2019-2023. Terdapat kompleksitas tantangan dalam penegakan NPT di mana kurangnya transparansi dalam program nuklir banyak negara, termasuk aktivitas nuklir Tiongkok. Dalam tahun 2019-2023, muncul berbagai indikasi ketidakpatuhan, kurangnya transparansi, inkonsistensi antara pernyataan dan kebijakan nuklir Tiongkok, serta pelanggaran kewajiban pelaporan yang memicu kekhawatiran internasional, menyoroti kompleksitas penegakan NPT di tengah ambisi hegemoni dan kepentingan keamanan nasional Tiongkok. Peneliti menganalisis faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian antara kebijakan nuklir Tiongkok dengan komitmen-komitmen non-proliferasi senjata nuklir. Untuk menjelaskan penyebab dan faktor pendorong ketidakpatuhan Tiongkok menggunakan konsep Chayes dan Chayes dengan tiga indikator, yaitu *ambiguity*, *limitations on capacity*, dan *the temporal dimension* sebagai panduan peneliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif menggunakan sumber sekunder dengan menggunakan situs resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok, artikel jurnal yang mendukung, dan situs resmi badan organisasi internasional. Penelitian ini menemukan penyebab ketidakpatuhan Tiongkok terhadap NPT dipengaruhi ambiguitas norma memberi ruang bagi Tiongkok memanfaatkan celah hukum, sementara ketidakpatuhan terhadap verifikasi, transparansi, dan pelucutan senjata dipengaruhi kepentingan politik serta strategi keamanan, sehingga adanya ketegangan politik, modernisasi militer, dan perubahan sosial-ekonomi mendorong pergeseran kepatuhan Tiongkok yang menyoroti dinamika perubahan dari waktu ke waktu.

Kata Kunci: NPT, Tiongkok, Non-proliferasi, Ketidakpatuhan internasional, Strategi keamanan



ABSTRACT

This study aims to analyze the factors causing China's non-compliance with the Non-Proliferation Treaty in 2019-2023. There are complex challenges in enforcing the NPT, including a lack of transparency in the nuclear programs of many countries, including China's nuclear activities. In 2019-2023, there were various indications of non-compliance, lack of transparency, inconsistencies between China's nuclear statements and policies, and violations of reporting obligations that triggered international concerns, highlighting the complexity of NPT enforcement amid China's hegemonic ambitions and national security interests. The researchers analyzed the factors causing the discrepancy between China's nuclear policy and its commitments to nuclear non-proliferation. To explain the causes and driving factors of China's non-compliance, they used Chayes and Chayes' concept with three indicators, namely ambiguity, limitations on capacity, and the temporal dimension as a guide for researchers. This study uses a qualitative research method with a descriptive analysis approach using secondary sources, namely the official website of the Chinese Ministry of Foreign Affairs, supporting journal articles, and the official websites of international organizations. This study finds that the causes of China's non-compliance with the NPT are influenced by the ambiguity of norms that allow China to exploit legal loopholes, while non-compliance with verification, transparency, and disarmament is influenced by political interests and security strategies, so that political tensions, military modernization, and socio-economic changes drive shifts in China's compliance, highlighting the dynamics of change over time.

Keywords: *NPT, China, Non-proliferation, International non-compliance, Security strategy*

